



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

SEJARAH PANGKALAN PSDKP TUAL



Bermula sebagai Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, salah satu UPT PSDKP pada tahun 2017 lalu resmi ditetapkan menjadi Pangkalan PSDKP Tual.

Peningkatan status kelembagaan ini seiring dengan maraknya kegiatan illegal fishing yang terjadi di wilayah Indonesia Timur. Wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual sendiri meliputi 3 Propinsi yaitu Maluku, Papua dan Papua Barat. Selain itu Pangkalan PSDKP Tual juga bertanggung jawab terhadap 3 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP):

1. WPP 714, meliputi perairan Laut Banda
2. WPP 715, meliputi perairan Laut Seram, Laut Halmahera dan Teluk Bintuni
3. WPP 718, meliputi Laut Aru dan Laut Arafuru

Sejak berdiri, kepemimpinan Pangkalan PSDKP Tual telah diemban oleh sejumlah pejabat sebagai berikut:

Yospendi, S.T., S.Sos. – Kepala Stasiun SDKP Tual pertama (11 Mei 2006 – September 2010),
Subagianto, S.Pi. – Kepala Stasiun SDKP Tual kedua (September 2010 – 26 Maret 2013),
Basri, A.Pi., M.Si. – Kepala Stasiun SDKP Tual ketiga (26 Maret 2013 – 5 September 2015),
Mukhtar, A.Pi., M.Si. – Kepala Stasiun SDKP Tual keempat (5 September 2015 – 20 April 2017),
Asep Supriadi, S.St.Pi., M.Si. – Kepala Stasiun SDKP Tual kelima (20 April 2017 – 13 Februari 2019),
Salman Mokoginta, S.St.Pi., M.Si. – Kepala Pangkalan PSDKP Tual pertama (19 Juni 2017 – 20 Desember 2019),
Sigit Bintoro, S.Pi. – Kepala Pangkalan PSDKP Tual kedua (20 Desember 2019 – sekarang).

Pangkalan PSDKP Tual membawahi lima Satuan Pengawasan (Satwas) SDKP yang tersebar di berbagai wilayah strategis. Satuan-satuan tersebut meliputi Wilker PSDKP Dobo, Satwas PSDKP Maluku Tenggara Barat (MTB) beserta Wilker PSDKP Kisar, Satwas PSDKP Sorong dengan Wilker PSDKP Sorong Selatan dan Wilker PSDKP Raja Ampat, serta Satwas PSDKP Kaimana yang mencakup Wilker PSDKP Fak Fak, Wilker PSDKP Wimro/Teluk Bintuni, dan Wilker PSDKP Avona. Selain itu, terdapat Satwas PSDKP Mimika dengan Wilker PSDKP Asmat, serta Satwas PSDKP Merauke dengan Wilker PSDKP Wanam.

Kantor Pangkalan PSDKP Tual, Komplek PPN Tual; Jl. Bukit Dumar No.1, Tual,
Pulau Dullah Sel., Kota Tual, Maluku



psdkp.tual



Pangkalan Psdkp Tual



PSDKP_Tual

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



#2024
KKP BEYOND

Profil & Kinerja

Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sorong



Profil & Kinerja

Satwas SDKP Sorong



Level organisasi : Non Eselon, berada dibawah kendali Pangkalan PSDKP Tual, Ditjen PSDKP



Pegawai : 13 Orang (PNS 10 Orang, PPPK 3 Orang)



Wilayah Kerja darat : Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Maybrat



Wilayah Kerja Laut : WPPNRI 715 (Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau) dan WPPNRI 717 (perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik)



Unit kerja dibawah kendali Satwas : 1 unit kerja yang eksisting yaitu Wilker PSDKP Raja Ampat



Kinerja :

- Sejak 2017 – 2021 3 kasus TPKP yang ditangani oleh Satwas SDKP Sorong
- 2025 = 1 kasus TPKP, 27 sanksi administratif, denda administratif Rp 27.384.880

Sarana dan Prasarana Pengawasan

Satwas SDKP Sorong



No.	Jenis Aset	Luas (m ²)	Lokasi	Status Kepemilikan
1.	Tanah	80.000	Trend Lodingfir, Makbusun, Mayamuk, Kab. Sorong. Papua Barat	Pemerintah RI cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan
2.	Tanah	1.500	Jl. Yos Sudarso. Kel. Sapordanco, Distrik Kota Waisai, Kab. Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya	Pemerintah RI cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan
3.	Pos Jaga	20	Trend Lodingfir, Makbusun, Mayamuk, Kab. Sorong. Papua Barat	Pemerintah RI cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan
4.	Gedung Kantor Wilker PSDKP Raja Ampat	154	Jl. Yos Sudarso. Kel. Sapordanco, Distrik Kota Waisai, Kab. Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya	Pemerintah RI cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan
5.	Gedung Kantor Satwas SDKP Sorong	300	Kompleks PPP Sorong	Lahan Milik Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Bangunan Milik Pangkalan PSDKP Tual

Sebaran Armada Pengawasan Pangkalan PSDKP Tual



DITJEN PENGAWASAN SUMBER
DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



Sarana dan Prasarana Pengawasan Satwas SDKP Sorong



DITJEN PENGAWASAN SUMBER
DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



SPEED BOAT NAPOLEON PANGKALAN PSDKP TUAL

PANJANG 12 M, LEBAR 3,20 M, TINGGI 1,60 M, DRAFT 0,60 M, DAYA MESIN 2X220 HP

Napoleon 18 (Sorong) | Napoleon 25 (Mimika) | Napoleon 42 (Raja empat)

Napoleon 49 (Dobo) | Napoleon 50 (MTB)



RUBBER BOAT PANGKALAN PSDKP TUAL

PANJANG 6 M, DAYA MESIN 1X40 HP
(RAJA AMPAT)

Sarana dan Prasarana Pengawasan Satwas SDKP Sorong



Objek pengawasan :

- Pengawasan operasional kapal perikanan
- Pengawasan jenis ikan dilindungi
- Pengawasan pengolahan ikan
- Pengawasan distribusi/pemasaran hasil perikanan
- Pengawasan kampung perikanan budidaya
- Pengawasan *destructive fishing*
- Pengawasan KKPR
- Pengawasan Pencemaran
- Pengawasan Alse
- Pengawasan kawasan konservasi



Permasalahan :

- Jumlah Kapal pengawas yang terbatas
- Hari operasi kapal pengawas terbatas
- Fasilitas dan sarana prasarana pengawasan (dermaga yang terbatas) mess ABK
- Daya tampung dermaga untuk menampung kapal hasil tangkapan terbatas.

Objek dan Permasalahan Satwas SDKP Sorong



Objek pengawasan :

- Pengawasan operasional kapal perikanan
- Pengawasan jenis ikan dilindungi
- Pengawasan Jenis Ikan yang merugikan dan membahayakan
- Pengawasan pengolahan ikan
- Pengawasan distribusi/pemasaran hasil perikanan
- Pengawasan kampung perikanan budidaya
- Pengawasan *destructive fishing*
- Pengawasan KKPR
- Pengawasan Pencemaran
- Pengawasan Alse
- Pengawasan kawasan konservasi



Permasalahan :

- Jumlah Kapal pengawas yang terbatas
- Hari operasi kapal pengawas terbatas
- Fasilitas dan sarana prasarana pengawasan belum terpenuhi



Tantangan Pemberantasan *IUU fishing* Di WPPNRI 715 dan WPPNRI 717



DITJEN PENGAWASAN SUMBER
DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



Isu pengawasan

- Perbatasan internasional (Pilipina, Palau, dan Papua Nugini)
- Samudera Pasifik merupakan salah satu **daerah rawan IUU fishing**
- Perairan WPP 715 dan 717 rawan kegiatan **destructive fishing**
- Kapal Pilipina, Vietnam, Taiwan melakukan **Penangkapan Ikan ilegal** di perairan utara Papua
- **Kapal ikan asing ilegal** keluar dan masuk ke perairan Indonesia

Pengelolaan Perikanan



WPPNRI 715 dan WPPNRI 717

715 : Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau

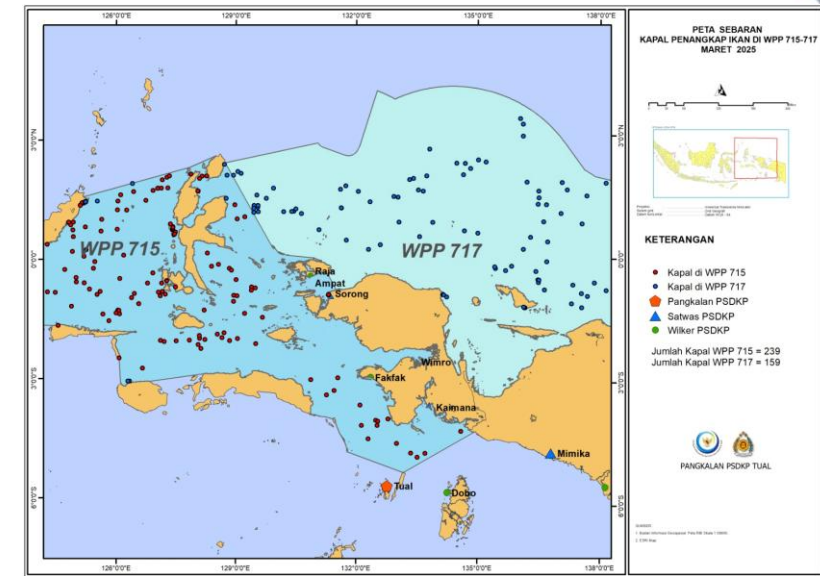
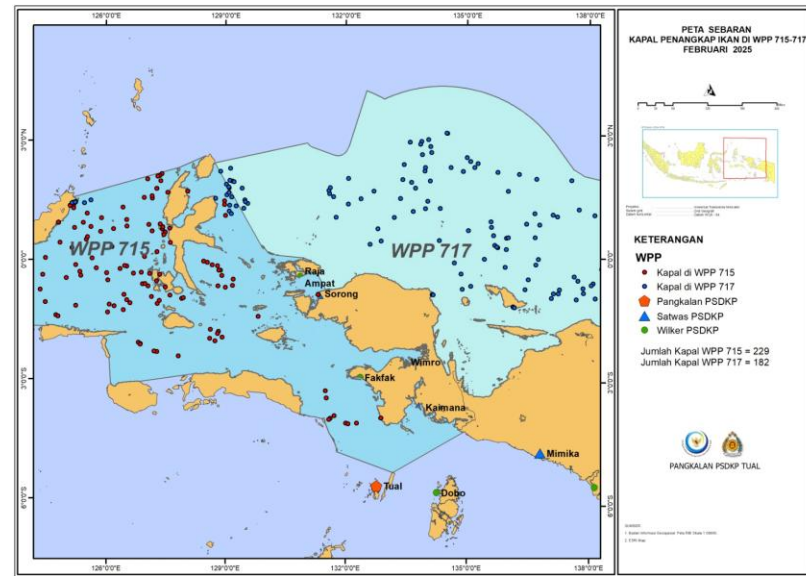
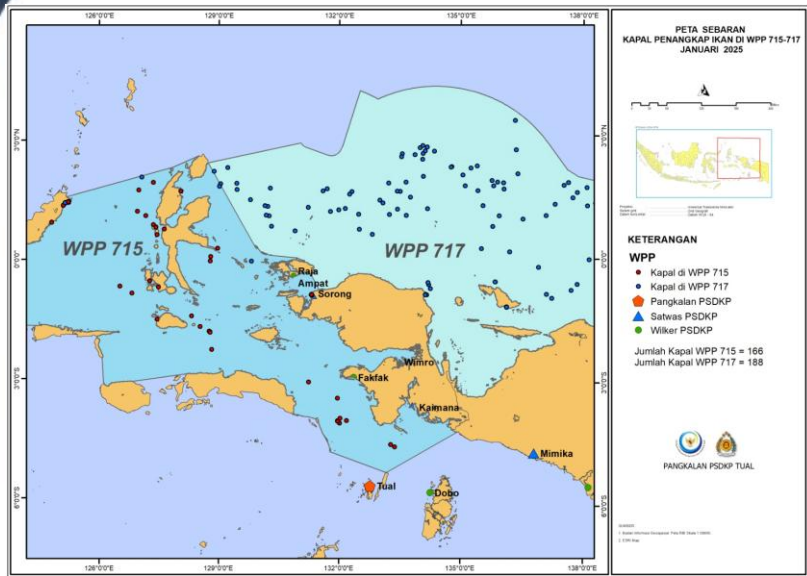
717 : perairan Teluk Cenderawasih dan Samudera Pasifik

Potensi Perikanan



1.139.996Ton/Tahun

Sebaran Pemantauan Kapal Perikanan Pada WPPNRI 715 dan WPPNRI 717

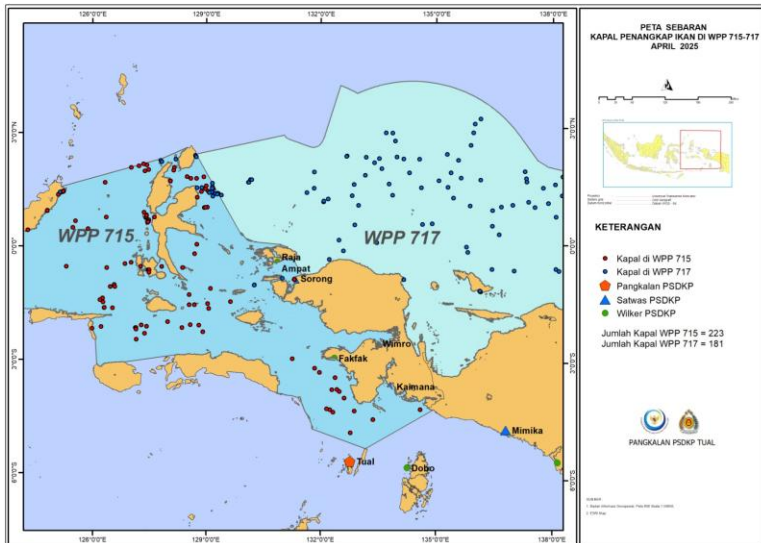


Januari
 WPP 715 : 166
 WPP 717 : 188

Februari
 WPP 715 : 229
 WPP 717 : 182

Maret
 WPP 715 : 239
 WPP 717 : 159

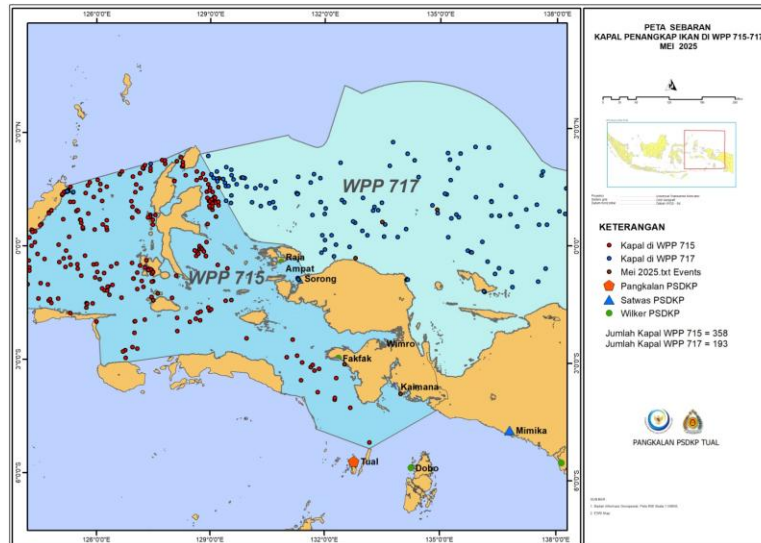
Sebaran Pemantauan Kapal Perikanan Pada WPPNRI 715 dan WPPNRI 717



April

WPP 715 : 223

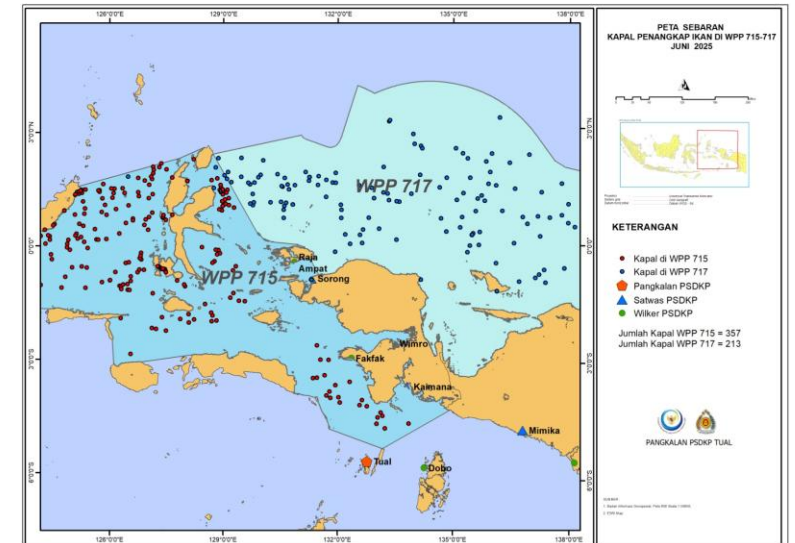
WPP 717 : 181



Mei

WPP 715 : 358

WPP 717 : 193

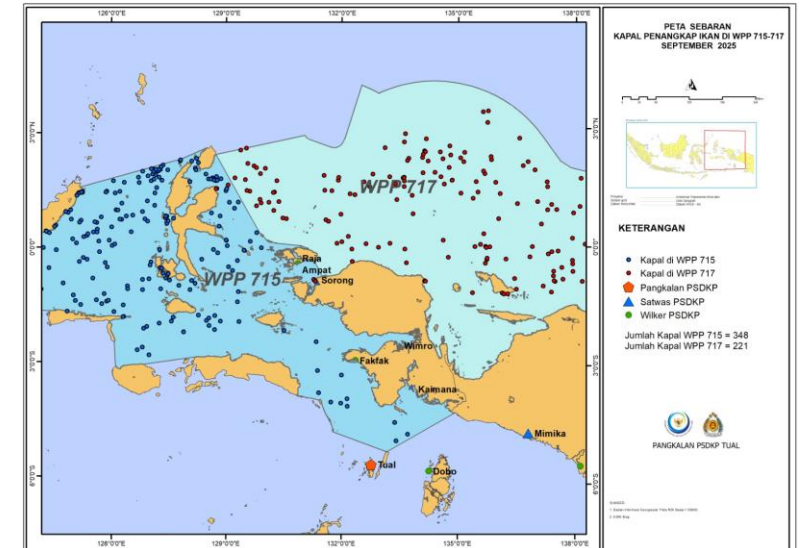
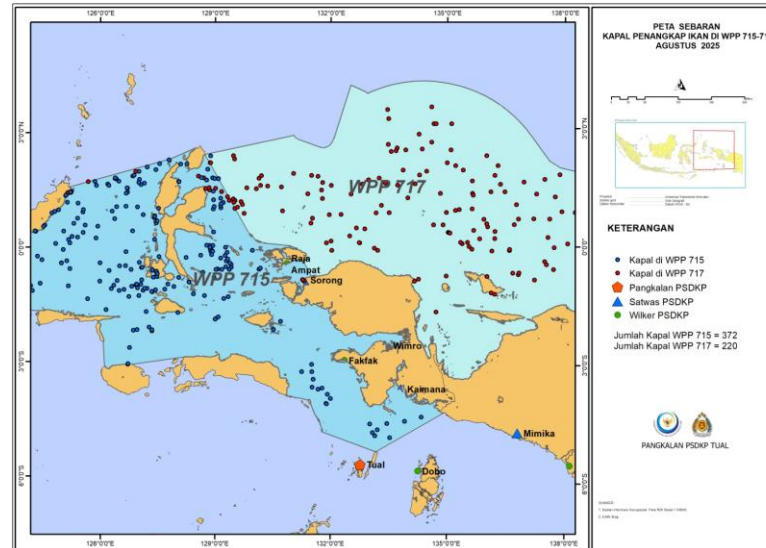
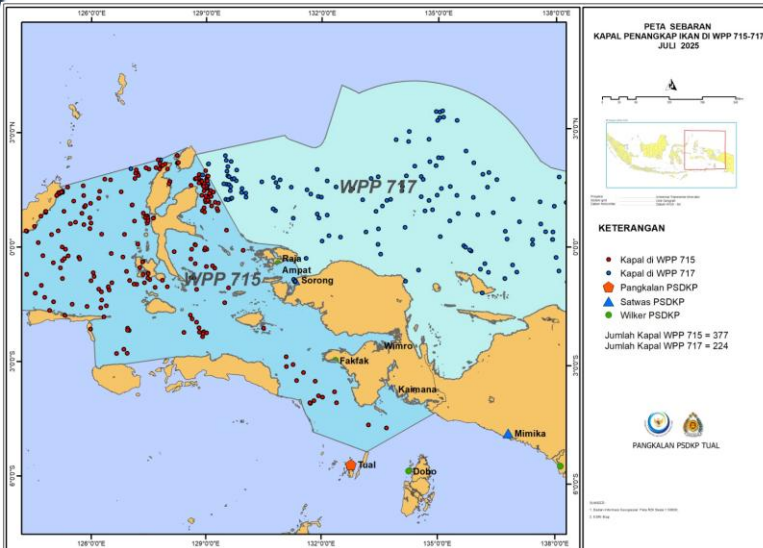


Juni

WPP 715 : 357

WPP 717 : 213

Sebaran Pemantauan Kapal Perikanan Pada WPPNRI 715 dan WPPNRI 717



Juli

WPP 715 : 377

WPP 717 : 224

Agustus

WPP 715 : 372

WPP 717 : 220

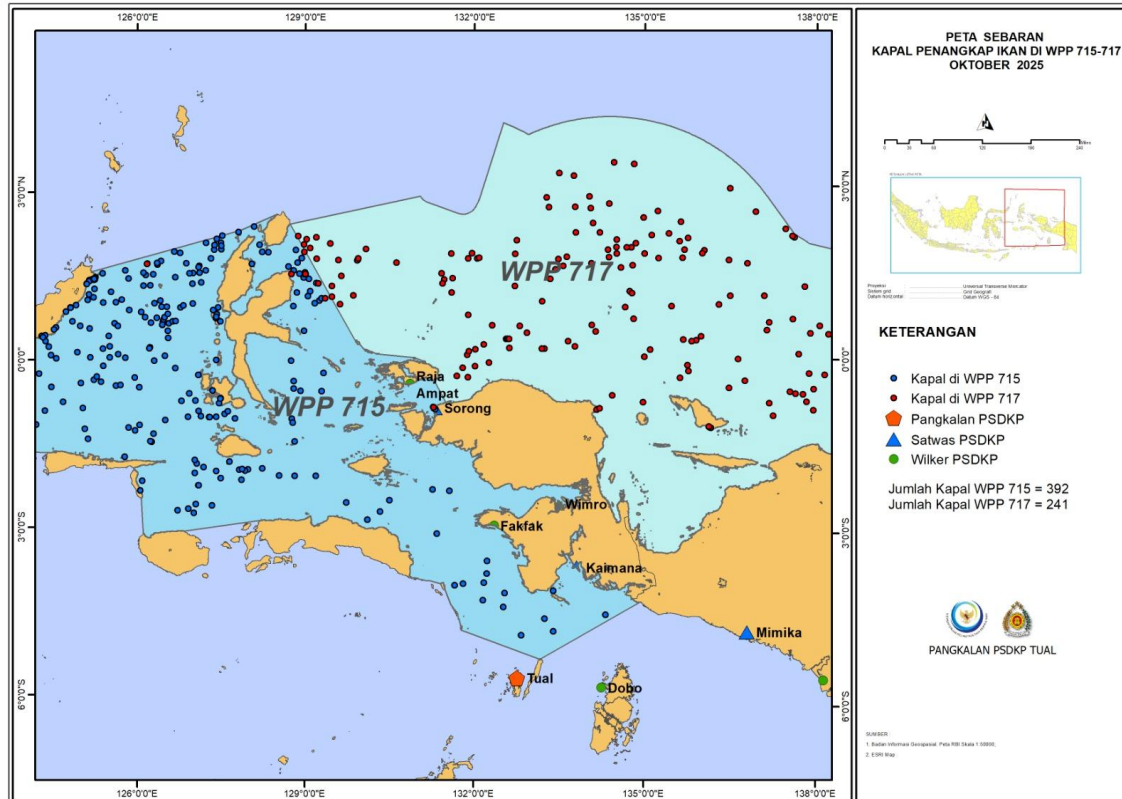
September

WPP 715 : 348

WPP 717 : 221



Sebaran Pemantauan Kapal Perikanan Pada WPPNRI 715 dan WPPNRI 717



Oktober
WPP 715 : 377
WPP 717 : 224

Bulan	WPP 715	WPP 717
Januari	166	188
Februari	229	182
Maret	239	159
April	223	181
Mei	358	193
Juni	357	213
Juli	377	224
Agustus	372	220
September	348	221
Oktober	392	241
Rata-rata	306	202

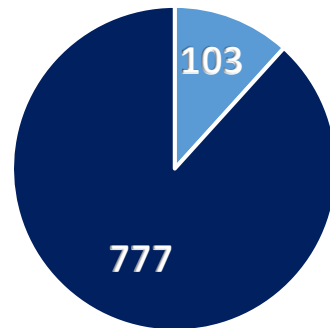
Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Di Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sorong Tahun 2025



KAPAL PERIKANAN

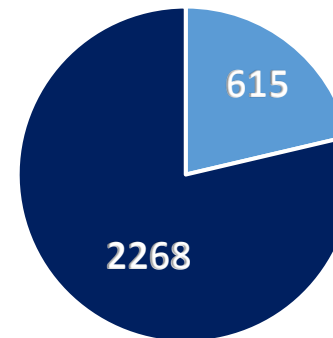
Periode 1 Januari s.d 29 Oktober 2025

JUMLAH KAPAL PERIKANAN



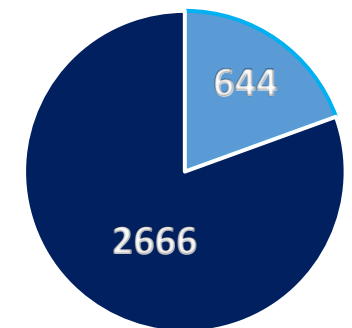
■ Izin Pusat ■ Izin Daerah

KEDATANGAN



■ Izin Pusat ■ Izin Daerah

KEBERANGKATAN



■ Izin Pusat ■ Izin Daerah

Total Kapal Perikanan Sorong



Izin pusat : 103
Izin Daerah : 777

Total : **880**

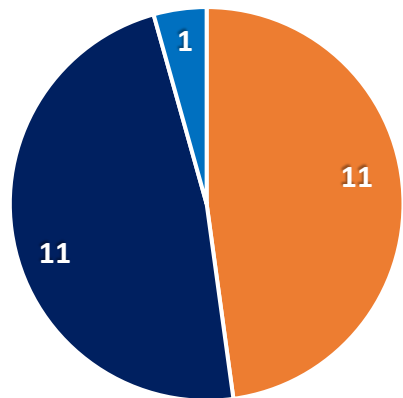
Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Di Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sorong Tahun 2025



DITJEN PENGAWASAN SUMBER
DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

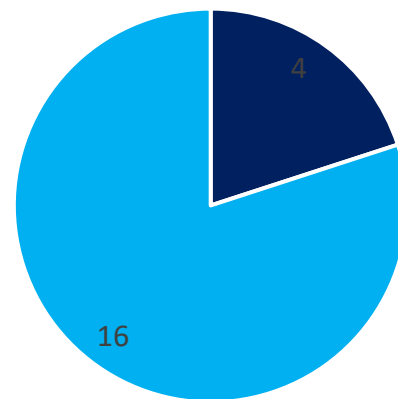


PEMANFAATAN JENIS IKAN DILINDUNGI



■ HIU ■ PARI ■ NAPOLEON

PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN



■ PMA ■ PMDN

BUDIDAYA IKAN

4

PMDN

PNBP PASCA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP



TOTAL PNBP
Rp 5.466.644.800,-

KENDALA YANG DIHADAPI



Pelanggaran dan kendala subsektor penanganan ikan:

- VMS kapal migrasi tidak terpantau (masalah daya listrik).
- Data kapal daerah tidak muncul di e-SLO (sinkronisasi SIMKADA).
- Regulasi telur ikan terbang belum lengkap.
- Penggunaan rumpon tanpa izin (SIPR).
- Keberatan daerah atas relaksasi penangkapan terukur & alih muat laut.
- Pelaksanaan kewenangan pengawasan provinsi belum optimal.

Subsektor Pembudidayaan Ikan:

- Biaya PKKPRL berdasarkan luas lahan, bukan long line.
- Perubahan zonasi Papua Barat → Papua Barat Daya.
- PKKPRL belum terbit → hambatan CPIB/CBIB.
- Lokasi budidaya mutiara jauh (± 40 mil).
- Pelaku usaha belum memiliki NIB individu.

Subsektor Pengolahan & Pemasaran Ikan:

- Kewenangan pengawasan provinsi belum berjalan.
- Pemenuhan PB & PB-UMKU (CPIB, SKP, HACCP) belum optimal.



Pengawasan Pemanfaatan Pulau – Pulau Kecil Di Wilayah Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sorong

Keragaman pemanfaatan pulau – pulau kecil

No	Nama Pulau	Luas (km2)	Pemanfaatan	Keterangan
1	Arborek	0,07	Wisata (Resort)	
2	Kri	1,60	Wisata (Resort)	
3	Merpati	-	Wisata (Resort)	
4	Mansuar	14,51	Wisata (Resort)	
5	Birie	-	Wisata (Resort)	
6	Wai	-	Wisata (Resort)	
7	Reni	0,92	Perkampungan	
8	Friwen (Friwin)	0,20	Wisata (Homestay)	
9	Piaynemo (Penemu)	4,8	Wisata (Homestay)	
10	Wayag	1.550,00	Wisata (Geosite)	
11	Pef	1.371,00	Wisata (Resort)	
12	Aljui	0,28	Budidaya Mutiara	PT. Cendana Indo Pearl
13	Gag	65,00	Tambang	
14	Kawei	45,61	Tambang	Tidak Aktif
15	Batang Pele	21,93	Tambang	Tidak Aktif
16	Manuran	7,47	Tambang	Tidak Aktif
17	Andau	1,09	Wisata (Resort)	
18	Yeben	0,57	Wisata (Resort)	
19	Batbitim	0,70	Wisata (Resort)	
20	Pulau Matan	0,01	Wisata Alam	
21	Batbitim	0,70	Wisata (Resort)	
22	Maga	1,30	Budidaya Mutiara	PT. Yellu Mutiara
23	Matte	0,27	Budidaya Mutiara	PT. Yellu Mutiara
24	Kabalam Batan	0,51	Budidaya Mutiara	PT. Yellu Mutiara
25	Waaf	0,80	Budidaya Mutiara	PT. Yellu Mutiara
26	Kasam	0,50	Budidaya Mutiara	PT. Yellu Mutiara
27	Doom	3,50	Perkampungan	
28	Raam	5,00	Perkampungan	
29	Soop (Tsiof)	2,67	Perkampungan	
30	Karim	0,40	Dockyard	PT. Pertamina Marine Engineer Dockyard
31	Pulau Hum	0,20	Wisata Alam	



Lokasi : Berdasarkan data statistis dari BPS Prov Papua Barat Daya, terdapat 3.022 pulau dengan rincian 2.875 pulau di wilayah Raja Ampat, 140 pulau di wilayah Sorong, 6 Pulau di sorong Selatan, 2 pulau di wilayah Tamberau.



Pelaku Usaha dan Jenis Kegiatan: Berdasarkan data disamping dapat dilihat terdapat 26 pulau yang dilakukan kegiatan pemanfaatan berupa 2 lokasi homestay, 2 Lokasi wisata Alam, 6 kegiatan Budidaya Mutiara, 11 Lokasi untuk resort, 3 Lokasi untuk perkampungan, 4 Lokasi untuk kegiatan pertambangan di pulau Gag yang masih aktif, 3 Lokasi pertambangan yang berstatus tidak aktif di Pulau Kawei, Menuran, Batang Pele, serta 1 Lokasi di pulau karim untuk Jasa Docking Kapal.



Permasalahan

Kendala yang dihadapi di lapangan yaitu keterbatasan jumlah personil, apabila dibandingkan dengan luasan wilayah yang harus dilakukan kegiatan pengawasan, Keterbatasan Anggaran operasional, serta kondisi cuaca yang tidak menentu.



Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Di Wilayah Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sorong

Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut



Lokasi : Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya



Jumlah Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut : Hingga saat ini terdapat 28 dokumen KKPRL yang telah diterbitkan di wilayah kerja Satwas SDKP Sorong. Rincian kegiatan meliputi pembangunan terminal khusus (tersus) dan terminal untuk kepentingan sendiri (tuks), kegiatan budidaya laut, penunjang pekerjaan docking kapal, kegiatan wisata bahari dan restoran, fuel terminal, serta eksplorasi minyak dan gas (migas) di wilayah perairan tertentu.



Pengawasan : Pada tahun 2025, Satwas PSDKP Sorong telah melaksanakan pengawasan insidental terhadap dua pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan ruang laut.



Tindak lanjut : Terhadap kedua pelaku usaha tersebut telah diberikan sanksi administrasi berupa denda administratif, sebagai tindak lanjut atas hasil supervisi dan pemeriksaan lapangan.

Pengawasan Kawasan Konservasi Di Wilayah Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sorong



DITJEN PENGAWASAN SUMBER
DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



**Pengawasan pada Kawasan Konservasi Kepulauan Waigeo
Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya :** Kegiatan pengawasan
difokuskan pada pemantauan aktivitas perikanan masyarakat,
pemanfaatan ruang laut oleh pelaku wisata, serta pengawasan
terhadap penggunaan alat tangkap yang berpotensi merusak
ekosistem



**Pengawasan pada Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat
dan Laut Sekitarnya :**
Pengawasan dilakukan terhadap kepatuhan pelaku usaha terhadap
dokumen perizinan pemanfaatan ruang laut (KKPRL), pengendalian
dampak terhadap ekosistem karang, serta kegiatan masyarakat lokal
yang memanfaatkan sumber daya alam di sekitar kawasan.



Hasil Pengawasan:

Menunjukkan bahwa tidak adanya aktivitas perikanan yang
merusak dan illegal serta pemanfaatan zona Kawasan konservasi
sesuai dengan zona yang ditetapkan



Penanganan Pelanggaran Satwas SDKP Sorong



SANKSI PIDANA (PENYIDIKAN TPKP)

Sejak tahun 20217-2025, terdapat 4 (empat) perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan :

1. KM. Sentosa XII / Indonesia / 27 GT (**Inkrah**)
2. KM. Luvenia / Indonesia / 30 GT (**Inkrah**)
3. KM. Markheit – 06 / Indonesia / 54 GT (**Inkrah**)
4. FB.LB. Rashell-107 / Filipina / 19,39 GT (**Tahap I**)



PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Sanksi Administratif Sumber Daya Kelautan

Tahun 2025 sebanyak 15 perkara terdiri dari :

- **SP1 : 13**
- **SP2 : -**
- **Paksaan Pemerintah : -**
- **Denda adm : 2**



Sanksi Administratif Sumber Daya Perikanan (Non SPKP)

Selama tahun 2025, sebanyak 12 perkara terdiri dari

- **SP1 : 11**
- **SP2 : -**
- **Paksaan Pemerintah : 1**
- **Denda adm : -**

Total denda administratif

Rp. 27.384.880



PT. Klasaman Indah Raya
Rp. 16.401.040

PT. Sagawin Sentosa Maritim
Rp. 10.983.840

Kendala yang dihadapi :

- a) Tidak ada juru bahasa/penerjemah bahasa Filipina/Tagalog yang tersumpah (tersertifikasi) di Sorong, sehingga harus mendatangkan dari daerah lain.
- b) Kejaksaan Negeri Sorong mengarahkan agar perkara perikanan dilakukan pelimpahan ke Kejaksaan Tinggi Papua Barat di Manokwari, sehingga sedikit terkendala untuk melakukan koordinasi dan penyampaian berkas perkara.
- c) Belum tersedia dermaga khusus untuk penampungan kapal-kapal yang menjalani proses hukum di Sorong, sehingga sedikit terkendala dalam penanganan dan penjagaannya.
- d) Belum tersedia rumah penampungan sementara untuk tersangka dan awak kapal non justitia di Satwas SDKP Sorong, sehingga dilakukan penampungan di kantor Satwas SDKP Sorong selama menjalani proses hukum.



Penyelesaian Perkara PT. Klasaman Indah Raya Dan PT. Sagawin Sentosa Maritim



PELANGGARAN
KKPRL

Pelanggaran

Menindaklanjuti Nota Dinas Plt. Direktur Perencanaan Ruang Laut Nomor B.1070/DJPKRL.2/PRL.140/IV/2025 dan 3177/DJPKRL.2/PRL.140/IX/2024, Pangkalan PSDKP Tual melaksanakan pengawasan insidental di lapangan dan menemukan pelanggaran pemanfaatan ruang laut yang dilakukan oleh PT Klasaman Indah Raya dan PT Sagawin Sentosa Maritim. Kedua perusahaan melakukan reklamasi untuk kebutuhan Terminal Khusus tanpa dilengkapi Dokumen PKKPRL maupun Izin Reklamasi.



Penetapan Denda

untuk PT Klasaman Indah Raya Penetapan Denda administrasi berdasarkan surat Ditjen PSDKP Nomor B.315/DJPSDKP/PW.470/V/2025 Tanggal 5 Mei 2025 dikenakan denda sebesar **Rp. 16.401.040** dan Untuk PT Sagawin Sentosa Maritim Penetapan Denda Administrasi berdasarkan Surat Ditjen PSDKP Nomor B.552/DJPSDKP/PW.470/VII/2025 tanggal 17 Juli 2025 dikenakan denda sebesar **Rp. 10.983.840**.



Penyelesaian Denda

PT Klasaman Indah Raya dan PT Sagawin Sentosa Maritim telah menyelesaikan pembayaran Denda Administratif ke rekening bendahara penerimaan Ditjen PSDKP pada tanggal **6 Mei 2025** dan **21 Juli 2025**.





Permasalahan Kegiatan Pengawasan

No.	Bidang Kegiatan	Permasalahan
1.	Subsektor Penangkapan Ikan	Pada kapal perikanan dengan perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah terdapat kendala berupa database kapal tidak muncul pada aplikasi e-SLO, kemungkinan terjadi karena data pada SIMKADA belum sinkron dengan database perizinan pusat pada aplikasi e-SLO;
2.	Subsektor Pembudidayaan Ikan	Pengajuan PKKPRL belum terpenuhi karena adanya permintaan pihak pembudidaya terkait luasan untuk tidak menghitung luasan yang tidak terpakai dalam kegiatan budidaya (besaran yang dibayarkan berpatokan pada luasan lahan secara keseluruhan (ha) bukan berdasarkan jumlah <i>long line</i> yang digunakan sebagai dasar dalam pemenuhan persyaratan dasar PKKPRL, Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah terdapat perubahan Zonasi setelah peralihan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat ke Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dimana sebelumnya wilayah yang mereka tempati masuk dalam zona perikanan budidaya tetapi setelah beralih ke Papua Barat Daya berubah menjadi zona perikanan tangkap dan zona pariwisata sehingga dalam pengajuan PKKPRL selalu ditolak oleh Tim Verifikasi Lapangan dari Loka PSPL Sorong



Permasalahan Kegiatan Pengawasan

No.	Bidang Kegiatan	Permasalahan
3.	Subsektor Pengolahan Ikan	Kegiatan usaha pengolahan ikan yang belum menerapkan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan Sertifikat Manajemen Mutu Produk (HAACP)
4.	Sumber Daya Kelautan	keterbatasan jumlah personil, apabila dibandingkan dengan luasan wilayah yang harus dilakukan kegiatan pengawasan, Keterbatasan Anggaran operasional, serta kondisi cuaca yang seringkali menyulitkan dalam melakukan kegiatan pengawasan tidak menentu dan masih terdapat pelaku usaha yang belum mengetahui terkait dengan kewajiban yang harus dipenuhi dalam memanfaatkan pulau-pulau kecil dan ruang laut.
5.	Penanganan Pelanggaran	<ul style="list-style-type: none">• Belum tersedia dermaga khusus untuk penampungan kapal-kapal yang menjalani proses hukum di Sorong, sehingga sedikit terkendala dalam penanganan dan penjagaannya.• Belum tersedia rumah penampungan sementara untuk tersangka dan awak kapal non justitia di Satwas SDKP Sorong, sehingga dilakukan penampungan di kantor Satwas SDKP Sorong selama menjalani proses hukum.

A photograph showing Indonesian military personnel on the deck of a ship. One soldier in the foreground is holding an M4-style rifle. In the background, a large white maritime patrol vessel with the text 'KAPAL PENGAWAS KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA' and the number '6002' is visible. To the right, a smaller red and white fishing boat is on the water. The scene is overlaid with a semi-transparent blue filter.

Terima Kasih